

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum Kota Surakarta yang berhubungan dengan konsep *15-minutes city* dalam penyediaan RTH publik untuk mewujudkan SDGs terdiri dari kependudukan, jaringan jalan, penggunaan lahan, sebaran fasilitas, lingkungan, kondisi digitalisasi, kebijakan perencanaan dan indikator SDGs di Kota Surakarta. Penjelasan bagian ini untuk membantu sebagai input data dan informasi pada bagian selanjutnya yakni analisis data.

4.1 Batas Administrasi Kota Surakarta

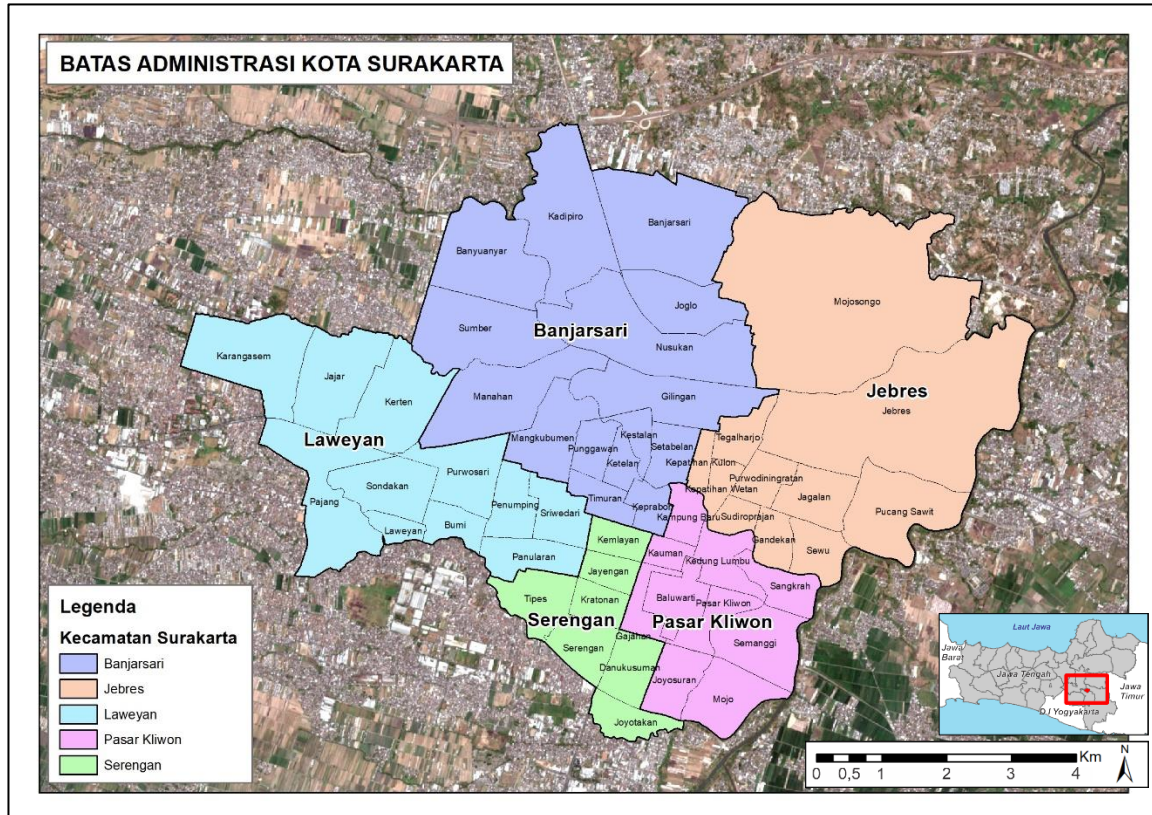
Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota terbesar ketiga di selatan Pulau Jawa tepatnya di Jawa Tengah yang menunjang kota metropolitan disekitarnya seperti Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau yang lebih populer dengan sebutan "Kota Solo" merupakan salah satu pusat dari Kawasan Metropolitan Solo Raya di Pulau Jawa bagian Selatan. Kawasan Metropolitan Solo Raya disebut juga kawasan Subosukowonosraten mencakup Kota Surakarta serta sejumlah kabupaten di sekitarnya, termasuk Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, yang secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan serta 51 kelurahan. Kota Surakarta berdasarkan aspek administrasi dan fungsional memiliki luas wilayah dengan luas kurang lebih 4.679,35 hektar terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 488,55 ha terdiri dari 9 kelurahan;
2. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 308,53 ha terdiri dari 7 kelurahan;
3. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 914,52 ha terdiri dari 11 kelurahan;
4. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 1.528,95 ha terdiri dari 13 kelurahan;
dan
5. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 1.438,80 ha terdiri dari 11 kelurahan
- 6.

Secara batas administrasi, Kota Surakarta berada di tengah Provinsi Jawa Tengah yang dikelilingi beberapa kabupaten, batas-batas administrasi Kota Surakarta meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali;

- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

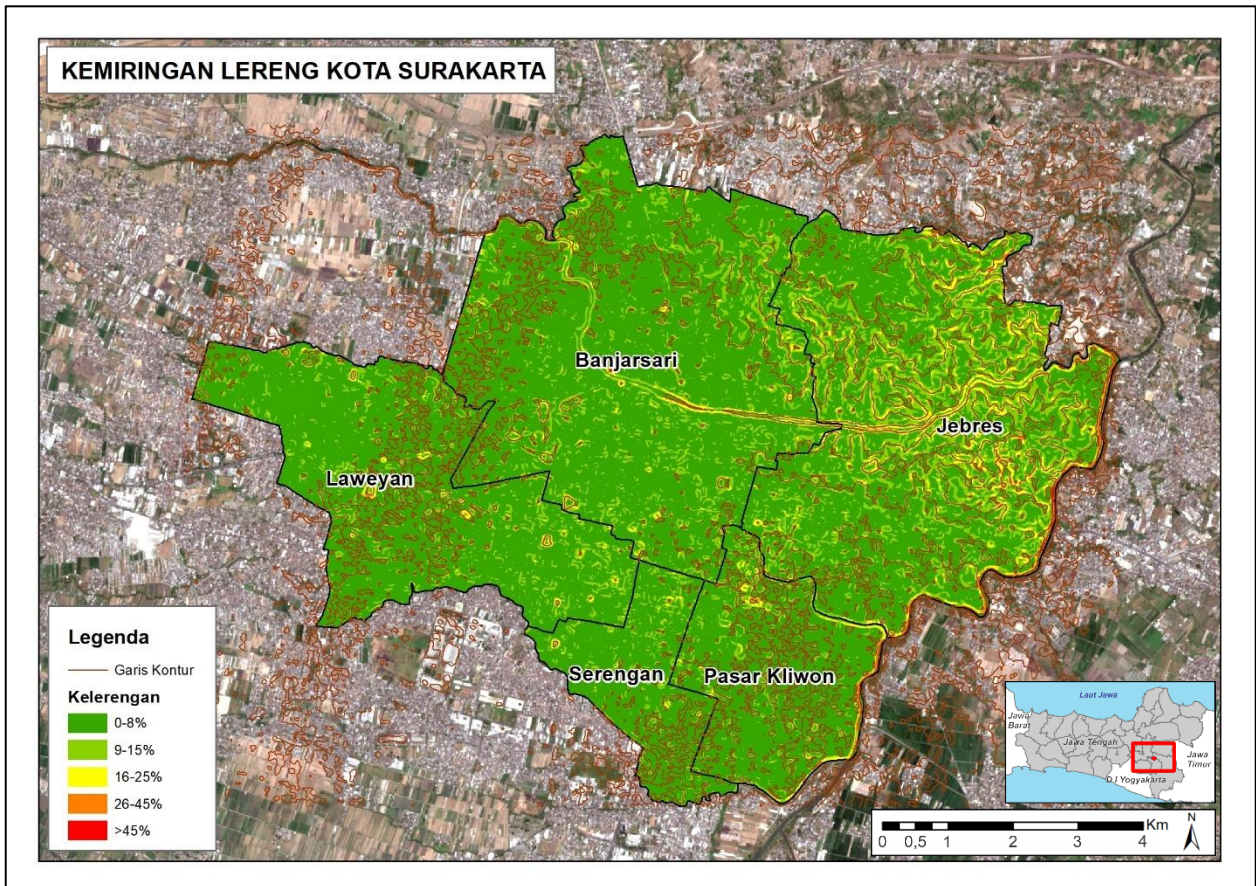


Gambar 4. 1. Peta Administrasi Kota Surakarta
 Sumber : Hasil Olah Data Dinas Pemerintah Kota Surakarta, 2024

4.2 Kondisi Topografi dan Kelerengan Kota Surakarta

Kondisi topografi dan kelerengan suatu kawasan perlu dilihat dalam penerapan *konsep 15-minutes city* yaitu sebagai faktor hambatan dalam melihat layanan fasilitas dalam dimensi *proximity*. Penerapan konsep ini perlu adanya penyesuaian infrastruktur dengan memperhitungkan aksesibilitas yang efisien di kawasan topografi yang beragam, termasuk dataran rendah hingga kawasan perbukitan. Kelerengan yang curam dapat menjadi tantangan dalam menyediakan konektivitas yang lancar antara berbagai zona kota, sementara lahan datar akan mempermudah aksesibilitas. Melalui gambaran umum kelerengan dan topografi di Kota Surakarta, implementasi konsep *15-minute city* di Kota Surakarta dapat lebih efektif agar memastikan bahwa masyarakat memiliki akses mudah ke berbagai fasilitas penting dalam

waktu singkat dengan mempertimbangkan tantangan geografis yang beragam dari wilayah tersebut.



Gambar 4. 2. Peta Kemiringan Lereng Kota Surakarta
Sumber : Hasil Olah Data DEM, 2024

Tabel 4. 1. Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng	Klasifikasi	Luas (km ²)
0-8%	Datar	35,344
9-15%	Landai	9,213
16-25%	Agak Curam	1,625
26-45%	Curam	0,247
>45%	Sangat Curam	0,014

Sumber : Hasil Olah Data DEM, 2024

Topografi Kota Surakarta terletak pada daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 80 hingga 130 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan **Gambar 4.2.** Lahan di Kota Surakarta memiliki kemiringan yang bervariasi, mulai dari 0%-15% namun didominasi kelerengan datar. Secara geografis, Surakarta terletak sekitar 65 kilometer di sebelah timur

laut Yogyakarta, 100 kilometer di sebelah tenggara Semarang, dan 260 kilometer di sebelah barat daya Surabaya. Kota ini dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, serta Gunung Lawu di bagian timur. Meskipun dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, Kota Surakarta tergolong wilayah yang memiliki topografi yang relatif datar.

Berdasarkan **Tabel 4.1.** didapatkan mayoritas wilayah Kota Surakarta didominasi oleh lereng yang datar (0-8%) dengan luas wilayah 35,344 km². Wilayah seperti ini cenderung cocok untuk pengembangan pemukiman dan infrastruktur perkotaan. Dominasi kawasan dengan kemiringan lereng datar mencerminkan adanya potensi pengembangan perkotaan yang relatif mudah. Wilayah dengan kelerengan antara 9 – 15% dengan luasan 9,213 km² menunjukkan kemiringan landai. Kelerengan landai bisa menimbulkan tantangan dalam pembangunan dan perencanaan penggunaan lahan, meskipun masih memungkinkan untuk berbagai keperluan seperti pemukiman dan pertanian. Selanjutnya, terdapat kawasan yang memiliki kelerengan yang curam, yaitu klasifikasi kelerengan agak curam 16 – 25% dan curam 26 – 45%. Luas wilayah dengan kemiringan tersebut masing-masing hanya 1,625 km² dan 0,247 km². Wilayah dengan kemiringan agak curam dan curam membatasi penggunaan lahan untuk keperluan tertentu dan bisa menimbulkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Adapun wilayah dengan kemiringan lebih dari 45% yaitu dengan klasifikasi sangat curam hanya mencakup luas 0,014 km² terletak di sempadan Sungai Bengawan Solo. Kondisi kelerengan sangat curam kemungkinan besar harus dijaga kelestariannya dan mungkin tidak cocok untuk pengembangan kawasan terbangun.

Pemahaman mendalam terhadap pola kemiringan lereng di Kota Surakarta penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan lingkungan, serta pengurangan risiko bencana. Dengan memperhatikan karakteristik topografi ini, pengembangan kota dapat dilakukan secara lebih efisien dan responsif terhadap lingkungan sekitarnya.

4.3 Kependudukan Kota Surakarta

Kondisi kependudukan di Kota Surakarta merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep *15-minutes city* yaitu pada dimensi *density*. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan pola kepadatan yang beragam di berbagai kecamatan akibat urbanisasi dan migrasi penduduk, penyesuaian infrastruktur harus mempertimbangkan distribusi penduduk untuk memastikan aksesibilitas yang merata dan efisien terhadap berbagai

layanan fasilitas perkotaan. Dengan memperhatikan persebaran dan kepadatan penduduk di Kota Surakarta, penerapan konsep *15-menit city* dapat diimplementasikan secara lebih efektif karena mempertimbangkan dimensi *density* yaitu keseimbangan antara sebaran penduduk dan kepadatan bangunan permukiman dengan sebaran layanan fasilitas yang dapat dijangkau dengan singkat. Berikut ini merupakan data kependudukan di Kota Surakarta.

Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk per Kelurahan Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)
Kecamatan Jebres	Kepatihan Kulon	33.743	0,19
	Kepatihan Wetan	12.145	0,23
	Sudiroprajan	14.419	0,24
	Gandekan	5.012	0,34
	Sewu	5.041	0,47
	Pucangsawit	7.236	1,27
	Jagalan	9.022	0,62
	Purwodiningratan	3.777	0,39
	Tegalharjo	54.434	0,4
	Jebres	2.653	4,33
Kecamatan Serengan	Mojosongo	2.485	5,9
	Joyotakan	8.004	0,43
	Danukusuman	10.121	0,53
	Serengan	10.959	0,52
	Tipes	12.287	0,64
	Kratonan	5.550	0,34
	Jayengan	3.912	0,3
Kecamatan Laweyan	Kemlayan	3.784	0,33
	Pajang	25.619	1,53
	Laweyan	2.105	0,21
	Bumi	6.367	0,36
	Panularan	9.586	0,56
	Sriwedari	4.047	0,54
	Penumping	3.964	0,51
	Purwosari	10.285	0,81
	Sondakan	12.321	0,8
	Kerten	9.363	1,23
	Jajar	9.356	1,15
Kecamatan Pasar Kliwon	Karangasem	10.482	1,43
	Joyosuran	10.599	0,53

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)
	Semanggi	23.235	0,9
	Pasar Kliwon	5.642	0,38
	Baluwarti	6.513	0,54
	Gajahan	3.939	0,31
	Kauman	2.647	0,21
	Kampung Baru	3.288	0,32
	Kedung Lumbu	5.521	0,49
	Sangkrah	12.682	0,46
	Mojo	14.198	0,75
Kecamatan Banjarsari	Mangkubumen	10.011	0,84
	Timuran	2.964	0,34
	Keprabon	3.019	0,31
	Ketelan	3.487	0,24
	Punggawan	4.343	0,34
	Kestalan	2.882	0,25
	Setabelan	4.116	0,44
	Gilingan	20.715	1,28
	Manahan	11.518	1,51
	Sumber	18.914	1,47
	Nusukan	31.320	2,04
	Kadipiro	24.819	1,84
	Banyuanyar	15.696	1,48
	Joglo	13.758	0,86
Banjarsari	20.056	2,04	

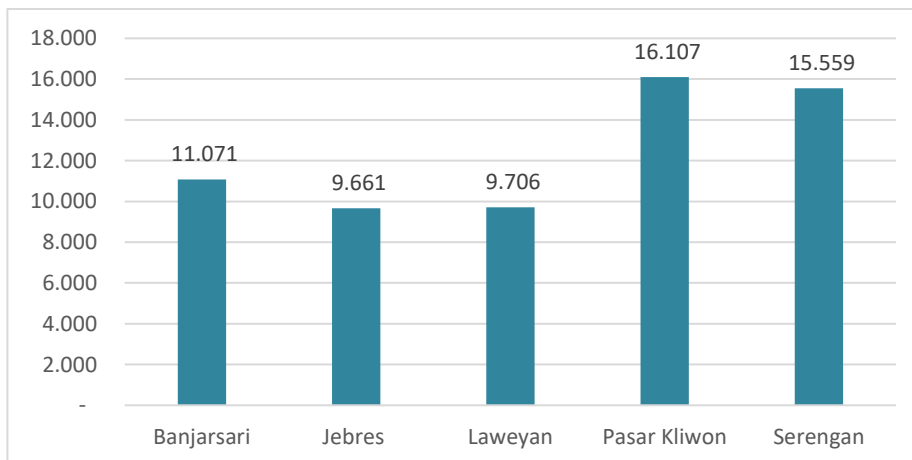
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km2)	Kepadatan Pdd
Banjarsari	168.949	15,26	11.071
Jebres	138.921	14,38	9.661
Laweyan	88.617	9,13	9.706
Pasar Kliwon	78.600	4,88	16.107
Serengan	47.921	3,08	15.559
Total	523.008	46,73	11.192

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan **Tabel 4.2.** terdapat lima kecamatan yang menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Menurut data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 523.008 jiwa dengan kepadatan rata-rata mencapai 11.192 penduduk

per kilometer persegi. Dari kelima kecamatan tersebut, Kecamatan Pasar Kliwon mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 16.107 jiwa per kilometer persegi, meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil yaitu 4,88 kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini dapat menjadi cerminan dari pusat aktivitas perdagangan dan bisnis yang ramai di kawasan tersebut. Sementara itu, meskipun memiliki jumlah penduduk paling banyak, Kecamatan Banjarsari mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasar Kliwon yaitu sekitar 11.071 jiwa per kilometer persegi. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Banjarsari yang lebih besar yaitu 15,26 kilometer persegi yang membuatnya menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Surakarta.

Kecamatan Jebres, Laweyan, dan Serengan juga menjadi bagian penting dari struktur kependudukan di Kota Surakarta dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan, meskipun kepadatan penduduknya berada dalam kisaran 9.000 hingga 15.000 jiwa per kilometer persegi. Keberagaman aktivitas ekonomi, budaya, dan sosial mungkin menjadi faktor penentu dalam distribusi dan pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. Secara keseluruhan, keberagaman kondisi kependudukan di Kota Surakarta menunjukkan dinamika yang menarik, di mana tiap kecamatan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan distribusi penduduk di kota ini.

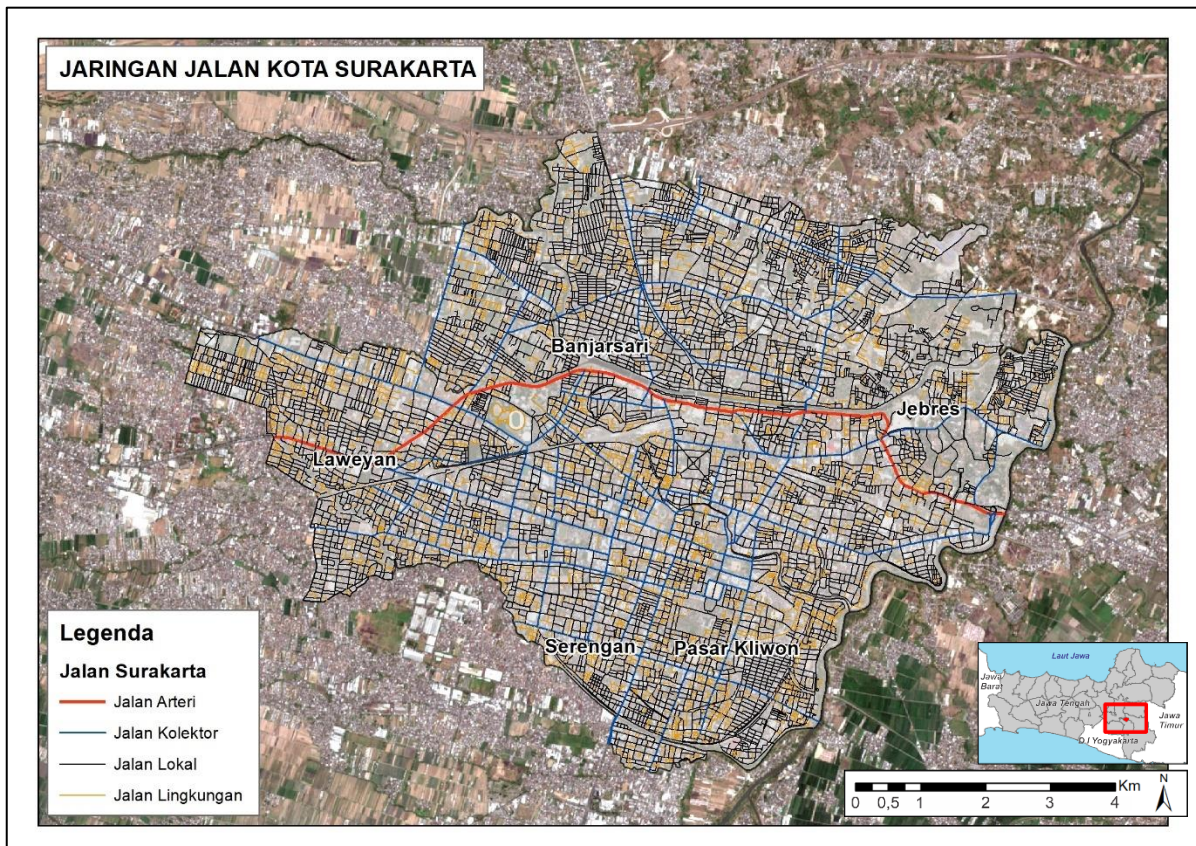


Gambar 4. 3. Grafik Kepadatan Penduduk Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data BPS, 202

4.4 Jaringan Transportasi Kota Surakarta

Jaringan jalan merupakan salah satu *core* utama pada konsep *15-minutes city*. Kondisi jaringan jalan terutama pada ketersediaan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di Kota Surakarta perlu diperhatikan dalam penerapan konsep *15-minutes city* karena masuk dalam dimensi *proximity* dan *quality*. Jaringan jalan dari segi dari dimensi *proximity* dapat dilihat dari jangkauan layanannya terhadap fasilitas dan konektivitas antar jaringan jalan lainnya. Sedangkan dari dimensi *quality*, jaringan jalan dapat dilihat dari ketersediaan dan konektivitas jalur pejalan kaki dan jalur sepeda beserta kualitasnya karena berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat untuk memaksimalkan penerapan konsep ini di Kota Surakarta. Dengan memastikan jaringan jalan yang efisien dan aksesibilitas yang baik bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda, kota dapat menciptakan mobilitas yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor sesuai dengan tujuan konsep *15-minutes city* ini diterapkan. Berikut ini merupakan peta jaringan transportasi di Kota Surakarta.



Gambar 4. 4. Peta Jaringan Transportasi Kota Surakarta
Sumber : Hasil Olah Data Open Street Map, 2024

Tabel 4. 3. Panjang tiap Fungsi Jalan di Kota Surakarta

Fungsi Jalan	Panjang (m)
Jalan Arteri	10.457,90
Jalan Kolektor	91.301,93
Jalan Lingkungan	246.801,97
Jalan Lokal	799.488,76
Grand Total	1.148.050,56

Sumber : Hasil Olah Data Open Street Map, 2024

Sebaran Jaringan jalan di Kota Surakarta menjadi komponen penting bagi konektivitas dan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan **Tabel 4.3.** total panjang jaringan jalan mencapai 1.148.050,56 meter yang terdiri dari fungsi jaringan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Jalan arteri menjadi jalur utama yang melintasi semua kecamatan dari arah timur ke barat membentang menghubungkan Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dengan panjang total 10.457,90 meter jalan arteri ini menjadi urat nadi bagi pergerakan barang dan manusia, serta menjadi koridor vital bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pusat kawasan perkotaan di Kota Surakarta.

Sementara itu, jaringan jalan kolektor, lingkungan, dan lokal tersebar merata di semua kecamatan, dengan masing-masing fungsi yang mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Jalan kolektor, dengan panjang total 91.301,93 meter berperan sebagai penghubung antar jalan arteri dengan jalan lingkungan dan lokal, serta menjadi akses penting menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Jalan lingkungan dengan panjang total 246.801,97 meter menghubungkan antar kawasan permukiman di dalam kecamatan, memfasilitasi akses menuju fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan taman. Sementara itu, jalan lokal, dengan panjang total 799.488,76 meter menghubungkan antarlingkungan hingga ke jalan arteri dan kolektor. Dengan adanya jaringan jalan yang komprehensif dan terintegrasi, Kota Surakarta dapat mengoptimalkan potensi ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui aksesibilitas yang lebih baik terhadap berbagai layanan fasilitas.

4.5 Penggunaan dan Kepemilikan Lahan Kota Surakarta

4.5.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terutama sebaran permukiman menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan konsep *15-minutes city*. Dengan memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan terencana, kota dapat mengoptimalkan aksesibilitas penduduk terhadap berbagai layanan dan fasilitas penting dalam jarak 15 menit dari kawasan permukiman dengan berjalan kaki atau bersepeda. Dalam hal ini penggunaan lahan perlu diperhatikan dalam dimensi *proximity* yaitu memastikan bahwa zona permukiman dapat dijangkau pelayanan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan juga ruang terbuka hijau dalam waktu yang relatif singkat dengan berjalan kaki atau bersepeda. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang ramah penghuni dan berkelanjutan serta meminimalkan kebutuhan akan mobilitas dengan kendaraan bermotor sesuai dengan konsep *15-minutes city*. Berikut ini merupakan luasan jenis penggunaan lahan di setiap kecamatan di Kota Surakarta.

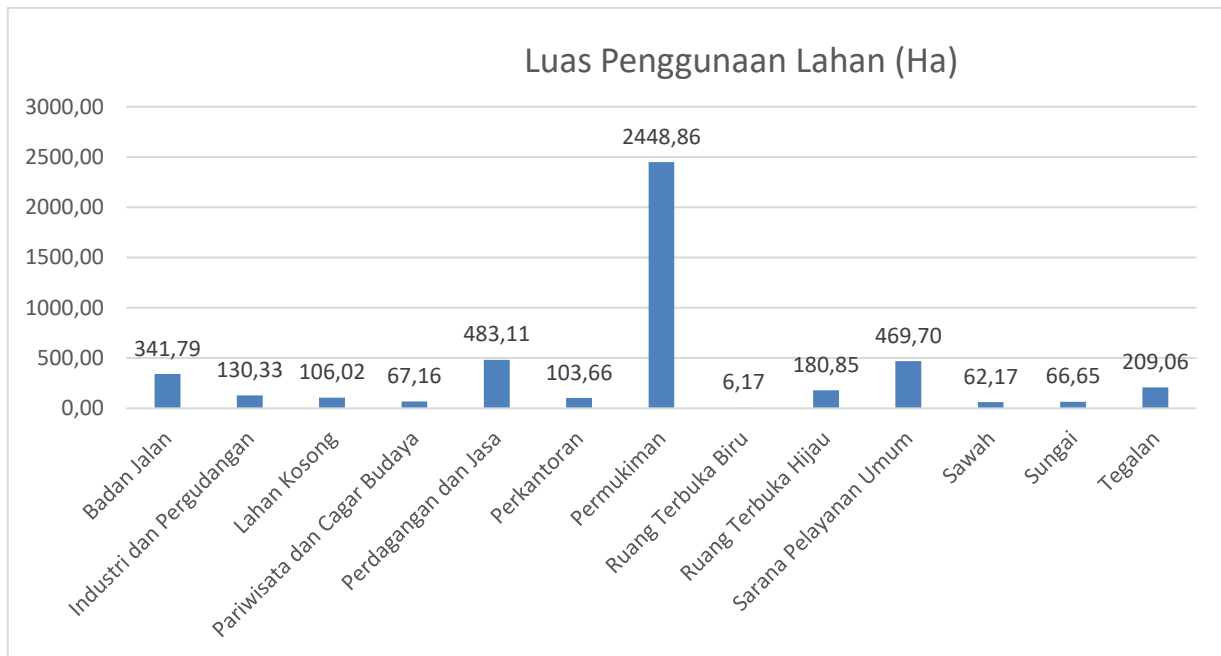
Tabel 4. 4. Luasan Penggunaan Lahan per Kecamatan Kota Surakarta

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Banjarsari	Badan Jalan	118,549
	Industri dan Pergudangan	25,129
	Lahan Kosong	23,110
	Pariwisata dan Cagar Budaya	16,545
	Perdagangan dan Jasa	157,952
	Perkantoran	41,025
	Permukiman	826,373
	Ruang Terbuka Biru	1,944
	Ruang Terbuka Hijau	57,038
	Sarana Pelayanan Umum	130,825
	Sawah	36,406
	Sungai	23,128
Tegalan	67,105	
Jebres	Badan Jalan	95,154
	Industri dan Pergudangan	52,896
	Lahan Kosong	40,696
	Pariwisata dan Cagar Budaya	5,001
	Perdagangan dan Jasa	110,045
	Perkantoran	24,458

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
	Permukiman	689,958
	Ruang Terbuka Biru	4,041
	Ruang Terbuka Hijau	76,318
	Sarana Pelayanan Umum	184,290
	Sawah	6,003
	Sungai	25,306
	Tegalan	126,266
Laweyan	Badan Jalan	65,063
	Industri dan Pergudangan	41,335
	Lahan Kosong	17,618
	Pariwisata dan Cagar Budaya	11,059
	Perdagangan dan Jasa	100,382
	Perkantoran	29,298
	Permukiman	475,089
	Ruang Terbuka Biru	0,166
	Ruang Terbuka Hijau	31,979
	Sarana Pelayanan Umum	98,323
	Sawah	19,761
	Sungai	5,451
Tegalan	14,584	
Pasar Kliwon	Badan Jalan	38,311
	Industri dan Pergudangan	8,760
	Lahan Kosong	21,315
	Pariwisata dan Cagar Budaya	34,523
	Perdagangan dan Jasa	57,976
	Perkantoran	5,818
	Permukiman	263,273
	Ruang Terbuka Biru	0,005
	Ruang Terbuka Hijau	11,900
	Sarana Pelayanan Umum	38,528
	Sungai	8,520
	Serengan	Badan Jalan
Industri dan Pergudangan		1,928
Lahan Kosong		3,279
Pariwisata dan Cagar Budaya		0,035
Perdagangan dan Jasa		56,759
Perkantoran		3,058

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
	Permukiman	192,075
	Ruang Terbuka Biru	0,011
	Ruang Terbuka Hijau	3,611
	Sarana Pelayanan Umum	17,737
	Sungai	4,244
	Tegalan	0,815

Sumber : Hasil Olah Data Citra Satelit Sentinel 2, 2024



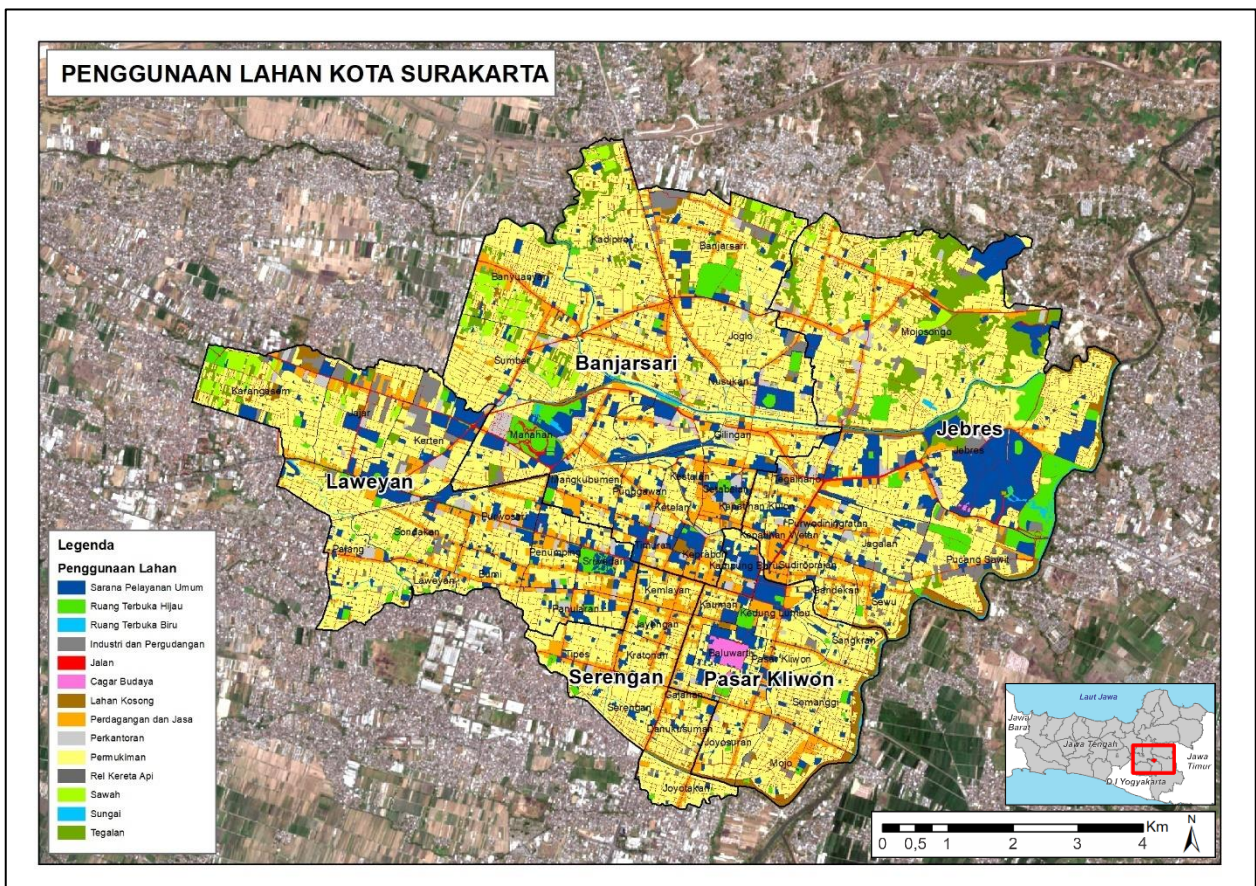
Gambar 4. 5. Grafik Penggunaan Lahan Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data Citra Satelit Sentinel 2, 2024

Berdasarkan identifikasi penggunaan lahan. di Kota Surakarta pada **Tabel 4.3** didominasi oleh penggunaan lahan Permukiman dengan luas sekitar 2.448,86 hektar atau sekitar 36,24% dari total luas wilayah merupakan penggunaan lahan yang mendominasi di Kota Surakarta. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan populasi yang signifikan dan kebutuhan akan tempat tinggal yang memadai bagi penduduk di Kota Surakarta. Kecamatan dengan dominasi kawasan permukiman terluas ada di Kecamatan Banjarsari dengan total luas permukiman 826,373 ha atau sebesar 33,4% dari total luasan permukiman di Kota Surakarta. Jenis penggunaan lahan perdagangan dan jasa serta sarana pelayanan umum juga menempati luas lahan yang besar, masing-masing mencapai 483,11 hektar dan 469,70 hektar atau sebesar 7,14% dan 6,94% dari total luas wilayah Hal tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi dan

pelayanan yang berkembang di Kota Surakarta.

Selain fungsi-fungsi perkotaan, Kota Surakarta juga memperhatikan pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Dengan adanya RTH mencapai 180,59 hektar dapat memberikan sirkulasi udara yang baik, area rekreasi, dan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota. Sementara RTB dengan luasan 72,17 ha yang meliputi sungai dan danau menjadi elemen penting dalam menjaga ketersediaan air dan pelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, lahan industri dan pergudangan serta lahan pertanian seperti tegalan dan sawah, memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan ketahanan pangan. Pariwisata dan cagar budaya, meskipun dengan luas yang lebih kecil yaitu 67,16 ha juga menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan serta menjaga keberagaman budaya dan sejarah kota. Dengan penggunaan lahan yang terencana dan beragam ini, Kota Surakarta terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah.



Gambar 4. 6. Peta Penggunaan Lahan Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data Citra Satelit Sentinel 2, 2024

4.5.2 Kepemilikan Lahan

Kondisi kepemilikan tanah di Kota Surakarta perlu diidentifikasi untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi RTH publik. Kepemilikan lahan berupa hak pakai merupakan jenis kepemilikan yang paling ideal untuk penyediaan RTH publik karena sebagian besar dimiliki dan berhak dipakai pemerintah untuk kepentingan umum. Sedangkan hak milik sebagian besar lahannya milik masyarakat dan perlu pembebasan lahan untuk penyediaan RTH publik. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dari Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik dapat diartikan sebagai hak yang diteruskan secara turun-temurun yang dimiliki seseorang terhadap tanah. Meskipun memiliki sifat-sifat yang membedakan dengan hak-hak lainnya, hak milik tidak bersifat mutlak, tidak terbatas, dan rentan terhadap gangguan.

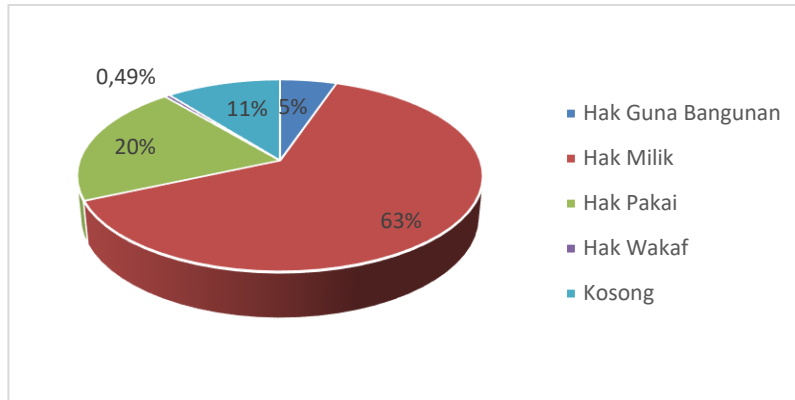
Penggunaan tanah seringkali berkaitan erat dengan kepemilikan tanah, dengan fungsi-fungsi yang berbeda dari penggunaan tersebut dapat menunjukkan pemilik dan/atau pengguna yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 menggarisbawahi pentingnya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mencapai ketertiban pertanahan. Hal ini mencakup aspek kontrol terhadap penggunaan tanah dan pengelolaan yang efisien, sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu, keberadaan data yang akurat mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kota Surakarta menjadi sangat krusial dalam upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan secara efektif.

Tabel 4. 5. Status Kepemilikan Tanah di Kota Surakarta (Ha)

No	Kecamatan	Hak Guna Bangunan	Hak Milik	Hak Pakai	Hak Wakaf	Lahan Kosong
1	Pasar Kliwon	28,62	225,07	68,17	4,67	120,61
2	Laweyan	54,54	539,93	189,75	5,47	132,63
3	Serengan	14,97	197,45	51,22	2,07	41,28
4	Banjarsari	50,14	861,52	250,89	4,96	163,24
5	Jebres	61,72	713,59	321,87	3,86	216,42
Total		209,99	2.537,57	881,90	21,03	674,18

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surakarta, 2022

Berdasarkan **Tabel 4.5.** Kota Surakarta didominasi jenis kepemilikan Hak Milik dengan persentase sebesar 67.47%, diikuti oleh Hak Guna Bangunan sebesar 8.19%, Hak Pakai sebesar 2.84%, Hak Wakaf sebesar 0.07%, dan lahan kosong sebesar 21.43%. Diversifikasi kepemilikan lahan ini mencerminkan kompleksitas struktur kepemilikan tanah di Kota Surakarta, yang memengaruhi pemanfaatan dan penggunaan lahan secara keseluruhan.



Gambar 4. 7. Grafik Kepemilikan Lahan Kota Surakarta
 Sumber : Hasil Olah Data BPN Kota Surakarta, 2024

4.6 Sebaran Fasilitas Kota Surakarta

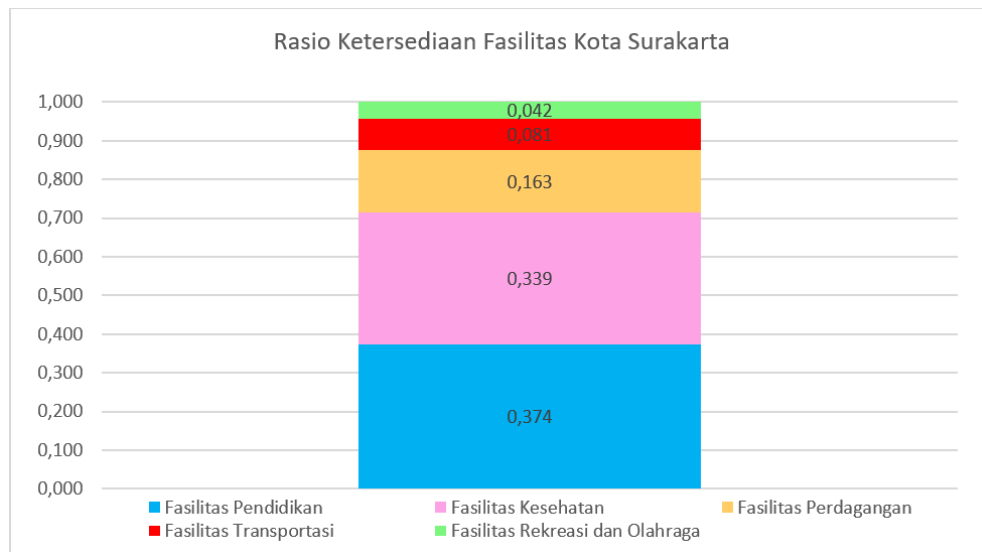
Selain aksesibilitas jaringan jalan, sebaran dan ketersediaan fasilitas di Kota Surakarta menjadi aspek penting dalam penerapan konsep *15-minutes city* karena termasuk ke dalam dimensi *proximity* dan *diversity*. Dalam konsep *15-minutes city* ada 5 fasilitas yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan rekreasi dan sosial. Sebaran fasilitas tersebut dalam dimensi *proximity* dalam konsep ini perlu dilihat untuk memastikan adanya distribusi yang merata dari fasilitas tersebut dalam jarak 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda dari setiap zona permukiman. Sedangkan dimensi *diversity* dari sebaran fasilitas untuk melihat keberagaman fasilitas yang dapat dijangkau untuk radius tertentu di kawasan permukiman, hal tersebut penting untuk memastikan tercapainya kepadatan fasilitas yang optimal untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan mobilitas tanpa kendaraan bermotor yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Pengumpulan data sebaran fasilitas di Kota Surakarta menggunakan *scrapping* data dari *google maps*. Fasilitas pendidikan terdiri dari Perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, dan TK/PAUD. Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan posyandu. Fasilitas perdagangan terdiri dari *mall*, pasar tradisional, dan retail diambil dari indomaret, alfamaret dan alfamidi. Fasilitas transportasi diambil dari data halte, stasiun dan terminal. Dan fasilitas rekreasi dan olahraga diambil dari RTH publik seperti hutan kota, taman kota, taman kecamatan, dan taman RTRW. Berikut ini merupakan sebaran fasilitas per tiap kecamatan di Kota Surakarta.

Tabel 4. 6. Sebaran Fasilitas di Kota Surakarta

Kecamatan	Fasilitas	Jumlah
Banjarsari	Fasilitas Pendidikan	126
	Fasilitas Kesehatan	151
	Fasilitas Perdagangan	63
	Fasilitas Transportasi	23
	Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	11
Jebres	Fasilitas Pendidikan	109
	Fasilitas Kesehatan	90
	Fasilitas Perdagangan	52
	Fasilitas Transportasi	21
	Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	11
Laweyan	Fasilitas Pendidikan	90
	Fasilitas Kesehatan	69
	Fasilitas Perdagangan	37
	Fasilitas Transportasi	25
	Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	13
Pasar Kliwon	Fasilitas Pendidikan	55
	Fasilitas Kesehatan	41
	Fasilitas Perdagangan	19
	Fasilitas Transportasi	15
	Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	8
Serengan	Fasilitas Pendidikan	49
	Fasilitas Kesehatan	38
	Fasilitas Perdagangan	16
	Fasilitas Transportasi	9
	Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	5

Sumber : Hasil Olah Data Scrapping Google Maps, 2024

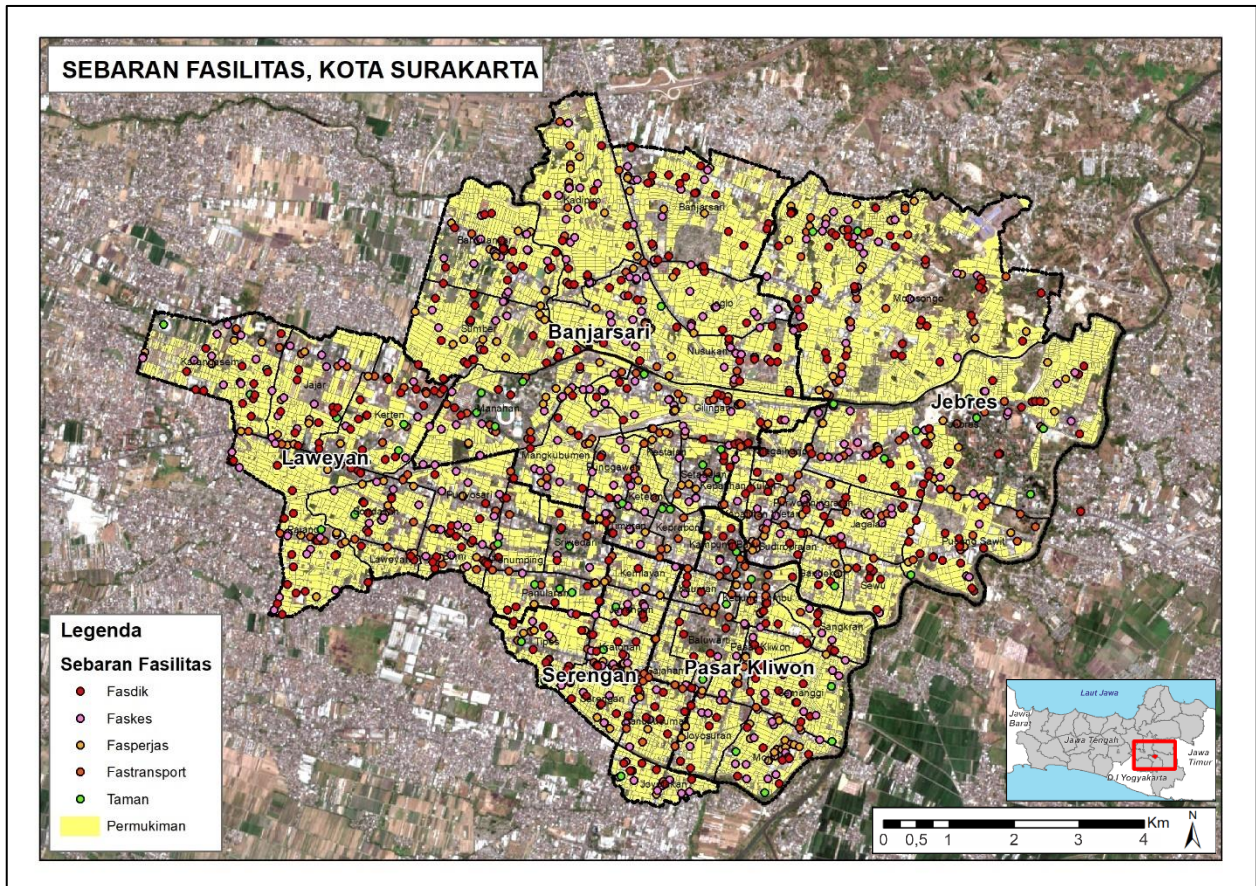


Gambar 4. 8. Grafik Rasio Perbandingan Fasilitas Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data Scrapping Google Maps, 2024

Berdasarkan **Tabel 4.6.** data sebaran fasilitas dari *google maps* terlihat bahwa Kota Surakarta memiliki keragaman fasilitas yang mencakup pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, serta rekreasi dan olahraga dengan total fasilitas 1.379 fasilitas. Fasilitas pendidikan menjadi yang terbanyak dengan jumlah mencapai 429 lokasi yang tersebar di setiap kecamatan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang luas kepada masyarakat di Kota Surakarta. Fasilitas kesehatan di Kota Surakarta secara total berjumlah 389 lokasi yang tersebar juga di semua kecamatan, hal tersebut menunjukkan perhatian yang serupa terhadap kesejahteraan dan kesehatan warga. Sementara itu, fasilitas perdagangan memiliki jumlah yang signifikan, mencapai 187 lokasi. Ini mencerminkan keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di Kota Surakarta. Diikuti oleh fasilitas transportasi yang berjumlah 93 lokasi, yang mungkin memenuhi kebutuhan mobilitas warga sehari-hari.

Meskipun demikian, fasilitas rekreasi dan olahraga berupa RTH publik seperti hutan kota dan jenis taman merupakan fasilitas yang paling sedikit dengan jumlah 48 lokasi dengan persebaran belum merata di tiap kecamatan. Hal ini mungkin menandakan adanya potensi untuk pengembangan fasilitas rekreasi dan kegiatan olahraga di Kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan grafik rasio pada **Gambar 4.8.** didapatkan bahwa rasio fasilitas rekreasi dan sosial berupa RTH publik merupakan fasilitas dengan rasio paling rendah dibandingkan fasilitas lainnya yaitu sebesar 0,042 yang berarti ketersediaan 1 fasilitas rekreasi dan sosial terdapat pada 25 fasilitas lainnya. Hal tersebut bisa menjadi permasalahan jika tidak dikendalikan karena pertumbuhan penduduk dan bangunan yang selalu bertambah tiap tahunnya jika ketersediaan fasilitas rekreasi dan sosial masih minim akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kualitas hidup di kawasan perkotaan.



Gambar 4. 9. Peta Sebaran Fasilitas Kota Surakarta
 Sumber : Hasil Olah Data Scrapping Google Maps, 2024

4.7 Luasan RTH Publik Kota Surakarta

Ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek dalam Pilar Lingkungan Tujuan Kota yang Berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sesuai dengan target 11.7 yang menjelaskan bahwa kota harus menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas. Salah satu indikatornya adalah jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau sesuai standar di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Standar yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan UN-Habitat yang menunjukkan bahwa proporsi kota yang baik memiliki sekitar 20% untuk RTH publik, hal tersebut sejalan dengan standar RTH di Indonesia dalam UU no 26 tahun 2007 yang mewajibkan setiap kota mempunyai 30% ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun hanya sedikit kota di dunia dapat memenuhi target ini.

Oleh karena itu untuk melihat pemenuhan Kota Surakarta atas target standar RTH dari tujuan SDGs perlu ditinjau ulang ketersediaan luasan RTH publik eksisting di Kota Surakarta.

Pentingnya memperhatikan luasan RTH publik di Kota Surakarta menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan nyaman bagi penduduknya. Dengan mengalokasikan dan menjaga luasan yang memadai dari RTH publik, kota dapat memberikan tempat untuk rekreasi, relaksasi, dan interaksi sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. RTH publik juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara, mengurangi efek urbanisasi, serta memberikan keberagaman ekosistem yang mendukung kehidupan hewan dan tumbuhan. Dengan demikian, memperhatikan luasan ruang terbuka hijau menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Kota Surakarta. Berikut ini merupakan sebaran jenis dan luasan RTH publik di Kota Surakarta.

Tabel 4. 7. Sebaran RTH publik di Kota Surakarta

Jenis RTH	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas
Hutan Kota	Taman Balekambang Dan Taman Pembibitan	Banjarsari	Manahan	83.647,63
Hutan Kota	Kawasan Taman Jurug	Jebres	Jebres	20.140,92
Pemukaman	Tpu Bonoloyo	Banjarsari	Banjarsari	123.575,42
Pemukaman	Makam Kyai Ageng Henis	Laweyan	Pajang	8.899,00
Pemukaman	Makam Jalan Veteran	Serengan	Tipes	9.426,49
Pemukaman	Makam Astonoloyo	Jebres	Mojosongo	3.833,32
Pemukaman	Makam Kramat	Laweyan	Laweyan	1.823,44
Pemukaman	Tpu Cemoro Kembar	Pasar Kliwon	Mojo	3.209,17
RTH Jalur Hijau Jalan	Jl.Adi Sucipto	Laweyan	Karangasem	274,08
RTH Jalur Hijau Jalan	Jalan Sam Ratulangi	Laweyan	Kerten	19.186,52
RTH Jalur Hijau Jalan	City Walk Jalan Slamet Riyadi	Laweyan	Sriwedari	6.392,92
RTH Jalur Hijau Jalan	City Walk Jalan Slamet Riyadi	Serengan	Kemlayan	5.058,39
RTH Jalur Hijau Jalan	Jalur Hijau Jalan Ronggowarsito (Utara)	Banjarsari	Keprabon	1.189,36
RTH Jalur Hijau Jalan	City Walk Jalan Monginsidi	Jebres	Tegalharjo	250,86
RTH Jalur Hijau Jalan	City Walk Jalan Alun-Alun Utara	Pasar Kliwon	Kauman	1.039,82
RTH Jalur Hijau Jalan	Jl.A.Yani	Jebres	Tegalharjo	231,9
RTH Jalur Hijau Jalan	Jalan Urip Sumoharjo	Jebres	Kepatihan Wetan	11.828,89
RTH Jalur Hijau Jalan	Jalur Hijau Jalan Slamet Riyadi	Laweyan	Kerten	1.402,13

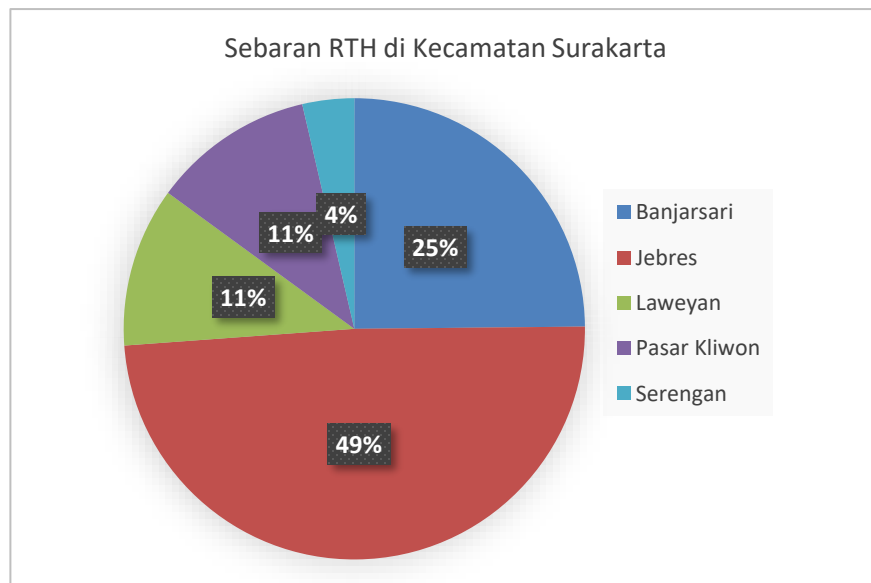
Jenis RTH	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas
RTH Sempadan Sungai	Taman Bantaran Sungai Pepe (Bagian Utara)	Banjarsari	Nusukan	17.356,80
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Pelem Wulung	Serengan	Joyotakan	21.229,13
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Bengawan Solo (Semanggi)	Pasar Kliwon	Semanggi	16.345,00
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Pepe	Banjarsari	Nusukan	16,01
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Gajah Putih	Banjarsari	Sumber	581,68
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Boro	Jebres	Jagalan	41,18
RTH Tertentu	Kadipiro	Banjarsari	Kadipiro	3.396,47
RTH Tertentu	Lapangan Kartopuran	Laweyan	Panularan	21.688,85
RTH Tertentu	Kompleks UNS	Laweyan	Pajang	23.140,98
RTH Tertentu	Pura Mangkunegaran	Banjarsari	Keprabon	445,06
Taman Kecamatan	Lapangan Sriwaru	Laweyan	Sondakan	10.378,52
Taman Kecamatan	Lapangan Losari	Pasar Kliwon	Semanggi	11.271,34
Taman Kecamatan	Lapangan Jajar	Laweyan	Jajar	7.186,44
Taman Kecamatan	Lapangan Kenteng	Pasar Kliwon	Mojo	5.934,91
Taman Kecamatan	Lapangan Pringgolayan	Serengan	Tipes	8.065,87
Taman Kecamatan	Lapangan Bola Ji Karto Puran	Serengan	Jayengan	8.949,01
Taman Kecamatan	Taman Monumen Achmadi	Banjarsari	Setabelan	734,2
Taman Kecamatan	Taman Cerdas Mojosongo	Jebres	Mojosongo	1.143,53
Taman Kecamatan	Taman Tugu Kebangkitan Nasional	Laweyan	Penumping	1.182,77
Taman Kecamatan	Taman Lottemart	Serengan	Tipes	824,12
Taman Kota	Stadion Manahan Dan Taman Selatan Stadion Manahan	Banjarsari	Manahan	111.250,34
Taman Kota	Taman Monumen 45 Banjarsari	Banjarsari	Setabelan	19.442,04
Taman Kota	Kompleks UNS	Jebres	Jebres	629.315,68
Taman Kota	Taman Sekartaji	Jebres	Jebres	27.972,08
Taman Kota	Urban Forest Pucang Sawit	Jebres	Pucangsawit	21.408,24
Taman Kota	Stadion Sriwedari	Laweyan	Sriwedari	63.518,03
Taman Kota	Alun-Alun Kidul Dan Taman Seputaran Alun Alun Selatan	Pasar Kliwon	Baluwarti	46.476,48
Taman Kota	Alun - Alun Utara	Pasar Kliwon	Baluwarti	39.112,98
Taman Kota	Taman Benteng Vastenburg	Pasar Kliwon	Kedung Lumbu	42.802,45
Taman Kota	Taman Tirtonadi	Banjarsari	Gilingan	5.061,22
Taman Kota	Taman Jayawijaya	Jebres	Mojosongo	6.964,15

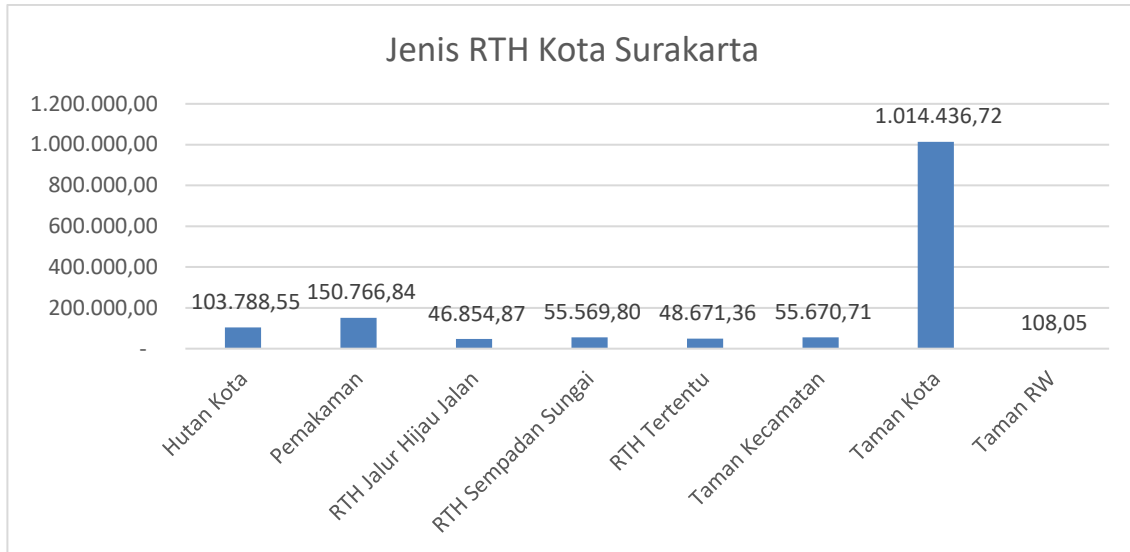
Jenis RTH	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas
Taman Kota	Taman Balaikota	Pasar Kliwon	Kampung Baru	1.113,03
Taman RW	Taman Bermain Anak Jalan Bengle	Laweyan	Pajang	108,05
Luas Total				1.808.566,90

Sumber : Hasil Olah Data DLH Kota Surakarta, 2024

Keberadaan RTH publik di perkotaan memiliki nilai penting yang tak terbantahkan. RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologis, sosial, budaya, dan estetika, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan kota hingga berdampak untuk kesehatan dan kebahagiaan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari adanya RTH publik mencakup manfaat langsung dan tidak langsung dalam jangka panjang yang seringkali bersifat tidak materiil. Pentingnya aksesibilitas yang merata, termasuk bagi disabilitas, menjadi aspek krusial dalam perencanaan dan pengembangan RTH. (Dwihatmojo, 2010).

Peran RTH khususnya RTH publik di kawasan perkotaan sangatlah krusial. Tanpa adanya RTH, perkotaan akan menghadapi berbagai masalah. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali yang nantinya dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan penurunan daya dukung lahan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH yang memadai di perkotaan. (Depdagri, 2007).





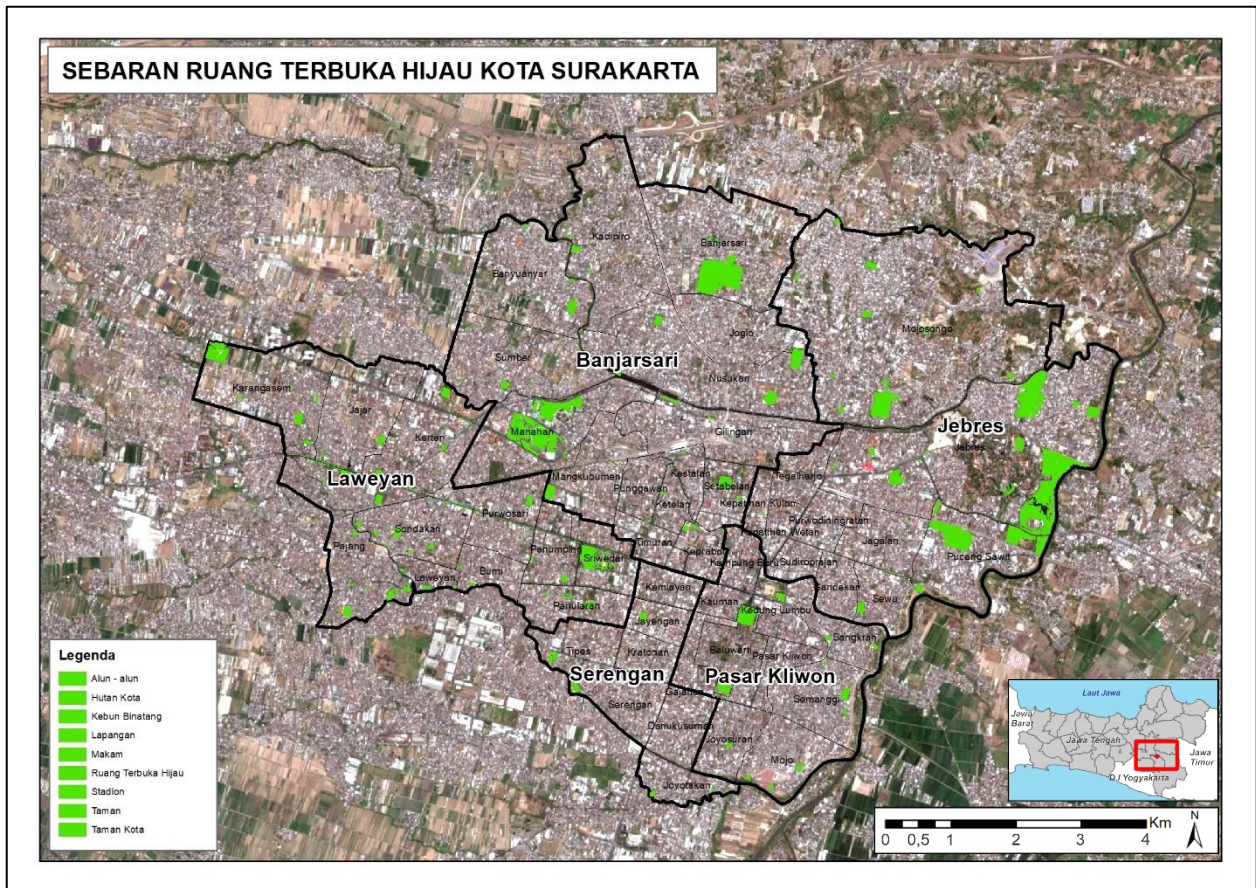
Gambar 4. 10. Grafik Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data DLH Kota Surakarta, 2024

Berdasarkan hasil identifikasi RTH publik pada **Gambar 4.10.** setiap kecamatan di Kota Surakarta mempunyai luasan RTH publik yang beragam. Kecamatan dengan sebaran terluas adalah Jebres dengan 723.130,75 m² atau sebesar 49% total RTH publik di Kota Surakarta, diikuti oleh Banjarsari dengan 366.696,23 m² atau sebesar 25%. Meskipun demikian, kecamatan lain seperti Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ruang terbuka hijau kota sebesar 24% dari total RTH publik di Kota Surakarta. Dalam klasifikasi jenis ruang terbuka hijau, hutan kota dan taman kota merupakan yang terluas, masing-masing mencapai 103.788,55 meter persegi dan 1.014.436,72 meter persegi. Sementara itu, pemakaman dan taman kecamatan juga memberikan kontribusi penting terhadap sebaran ruang terbuka hijau di berbagai wilayah kota. Selain itu, terdapat juga ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan, sempadan sungai, serta taman tingkat RT yang turut memperkaya lanskap kota Surakarta.

Dengan sebaran yang luas dan beragam ini, ruang terbuka hijau di Kota Surakarta tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga memberikan ruang bagi warga kota untuk beraktivitas, beristirahat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hal ini menegaskan komitmen Surakarta dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan serta kualitas hidup warganya. Kurangnya RTH publik di Kota Surakarta nantinya sangat berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan seperti pencemaran udara hingga banjir karena RTH publik juga berfungsi sebagai daerah resapan air,

dan juga berdampak pada social seperti kriminalitas dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk berinteraksi sosial.



Gambar 4. 11. Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta
Sumber : Hasil Olah Data Citra dan DLH Kota Surakarta, 2024

4.8 Digitalisasi dan Ekosistem Kecerdasan di Kota Surakarta

Peningkatan angka digitalisasi pasca pandemi COVID-19 mempengaruhi beberapa inovasi perkotaan di dunia. Begitu pula dengan konsep *15-minutes city*, kemampuan yang diberikan oleh digitalisasi selama pandemi meyakinkan para pendukung konsep tersebut untuk memanfaatkan teknologi kota pintar untuk melengkapi dimensi lainnya (Moreno et al., 2021). Dimensi digitalisasi dianggap sangat penting dalam memastikan keberhasilan keempat dimensi sebelumnya. Secara khusus, dimensi ini sangat selaras dengan konsep Kota Cerdas dengan berbagai inovasi ekosistem kecerdasannya yang menjadi salah satu inspirasi Moreno

dalam mengkonseptual kota 15 menit. Oleh karena itu pada bagian ini akan diberikan gambaran umum mengenai digitalisasi dan ekosistem kecerdasan di Kota Surakarta yang ditinjau berdasarkan dokumen Masterplan Smart City Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang divalidasi dari portal berita untuk program yang berhasil dijalankan sampai dengan saat ini.

Kota cerdas umumnya didasarkan pada 3 faktor utama. 1) faktor manusia yang mengacu pada keberadaan masyarakat yang kreatif dalam berbagai bidang pekerjaan, memiliki jejaring pengetahuan yang luas, dan tinggal dalam lingkungan yang aman. 2) faktor teknologi yang menekankan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai landasan utama dalam pengelolaan kota. 3) faktor kelembagaan, yang mencakup partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam kota termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan warga dalam partisipasinya dalam perencanaan berbasis TIK. Ada beberapa referensi dimensi komponen smart city seperti 6 dimensi dalam kota cerdas dari Kominfo Replublik Indonesia, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*. Ataupun 8 Layer *smart city* oleh Ridwan Sutriadi, yaitu Layer 1: Identitas/Integrity, Layer 2 : Sejarah dan Budaya, Layer 3 : Karakteristik Ruang, Layer 4 : Ekonomi, Layer 5 : Ekosistem Kecerdasan, Layer 6 : Kesiapan Teknologi, Layer 7 : Dampak Kehadiran Tekonologi, Layer 8 : Sistem Tata Kelola (Sutriadi, 2018). Dalam pembahasan mengenai digitalisasi dan ekosistem kecerdasan di Kota Surakarta akan digambarkan pada layer 5 dan layer 6 yaitu Ekosistem Kecerdasan dan Kesiapan Teknologi di Kota Surakarta.

Tabel 4. 8. Identifikasi Ekosistem Kecerdasan dan Kesiapan Teknologi Kota Surakarta

Layer 5 : Ekosistem Kecerdasan	Layer 6 : Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi
1) Kota Surakarta memiliki 183 start up yang tersebar pada beberapa bidang dan fokus penerapan teknologi, antara lain Animasi, Fotografi, Kuliner, Aplikasi, Desain Periklanan, Desain Kriya, Seni Rupa, Arsitektur, Kuliner, Fashion dan sebagainya (IDSD Kota Surakarta, 2021) 2) Sebagai salah satu pusat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta memiliki 39 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tersebar di wilayah administratif Kota Surakarta (BPS Kota Surakarta, 2023).	1) Persentase jalan dengan kondisi baik yaitu 85,5%, dengan ketersediaan jalur pejalan kaki 25,5%, dan persentase PJU dengan kondisi baik mencapai 82,5% dari total PJU yang ada. Persentase tersebut tersebar di seluruh wilayah administratif Kota Surakarta (PUPR Kota Surakarta, 2021) 2) Persentase pemenuhan rambu lalu lintas di Kota Surakarta pada tahun 2020 telah mencapai 79,49%. Telah terdapat 3.376 unit rambu lalu lintas yang telah terpasang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan

<p>3) SDM di pemerintahan (ASN) mayoritas sudah berpendidikan sarjana berpendidikan S1 (Sarjana) dengan jumlah SDM mencapai 3.196 orang atau sebesar 54,73% dan S2 dan S3 sebanyak 810 orang dengan persentase 13,89% (BKPPD Kota Surakarta, 2021).</p> <p>4) Sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menunjang penerapan e-government hingga tahun 2021 sebanyak 71 website dan 131 sistem informasi (Diskominfo Kota Surakarta, 2022).</p>	<p>sebanyak 4.247 unit rambu lalu lintas (Dishub Kota Surakarta, 2021).</p> <p>3) Hampir di seluruh wilayah Kota Surakarta sudah dilingkupi jaringan 4G/LTE dari berbagai operator seluler di Kota Surakarta dengan persentase jaringan 86,7% (Diskominfo Kota Surakarta, 2022).</p> <p>4) Seluruh kantor pemerintah daerah di Kota Surakarta telah memiliki akses Wifi Publik, dan akses Wifi Publik sudah tersedia di 12 Taman Cerdas di Kota Surakarta, Taman Sriwedari, Taman Manahan, Taman Balekambang, Pasar Swalayan, dan sejumlah titik <i>city walk</i> Slamet Riyadi (Diskominfo Kota Surakarta, 2022).</p>
--	--

Sumber : Hasil Tinjauan Literatur, 2024

Berdasarkan **Tabel 4.8.** tinjauan literatur dari Masterplan Smart City Kota Surakarta tahun 2021 – 2026 di atas dalam dimensi digitalisasi konsep *15-minutes city*, Kota Surakarta menunjukkan potensi yang kuat dalam memperkuat ekosistem kecerdasan dan kesiapan teknologi untuk mendukung digitalisasi perencanaan khususnya untuk penerapan konsep *15-minutes city*. Dengan memiliki banyak startup yang tersebar di berbagai bidang teknologi dan kreatif, serta 39 perguruan tinggi negeri dan swasta diharapkan dapat mendukung konsep inovasi dan kolaborasi antara sektor industri dan pendidikan untuk mewujudkan konsep *15-minute city*. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan dan pejalan kaki yang baik juga mendukung konsep ini terwujud dengan baik. Dukungan ini diperkuat oleh ketersediaan sistem informasi dan jaringan 4G/LTE yang sudah tercapai di hampir seluruh wilayah, serta akses Wi-Fi publik yang telah tersedia di kantor pemerintah daerah dan sejumlah taman kota dan juga beberapa titik pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pejalan kaki. Melalui kombinasi antara digitalisasi dalam perencanaan kota, Kota Surakarta berpotensi untuk memperkuat konsep *15-minutes city*, memastikan aksesibilitas yang berkualitas sehingga dapat membangun ekosistem kenyamanan berjalan kaki bagi masyarakat Kota Surakarta.

4.9 Kebijakan Perencanaan Kota Surakarta

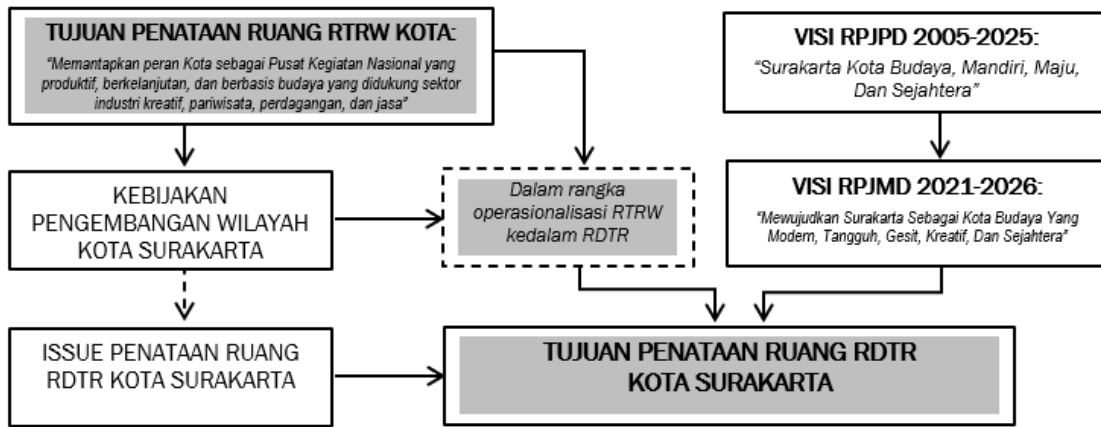
4.9.1 Tujuan Perencanaan Tata Ruang Kota Surakarta

Tujuan Penataan Ruang RDTR Kota Surakarta ditetapkan dengan mengacu tujuan penataan ruang RTRW, kebijakan pengembangan wilayah, serta mempertimbangkan isu strategis penataan ruang RDTR kota surakarta dan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kota Surakarta. Permasalahan utama yang dihadapi Kota Surakarta dalam pengembangan wilayah adalah terbatasnya lahan untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pengembangan ruang investasi. Pemecahan yang masalah yang dihadapi Kota Surakarta selanjutnya dilaksanakan melalui pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal adalah pemecahan masalah yang mengedepankan kondisi wilayah Kota Surakarta. Dalam pendekatan ini Pemerintah Kota Surakarta berupaya mengembangkan kebijakan yang inovatif dalam mengatasi permasalahan kota melalui:

- a. Mengembangkan sistem pusat pelayanan di kawasan pinggiran Kota, sekaligus diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perbatasan;
- b. Mengembangkan pusat kota lama (Koridor kawasan jalan Slamet Riyadi dan sekitarnya) sebagai jantung kota yang mencitrakan kawasan budaya yang bernilai ekonomi;
- c. Mengembangkan ruang permukiman perkotaan yang efektif dan efisien melalui kebijakan bangunan vertikal;
- d. Pengembangan kerja sama public – privat dalam penyediaan RTH publik;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana kota yang berbasis sistem;
- f. Peningkatan pengelolaan Kota berbasis teknologi (*Smart City*);

Mengacu pada tujuan penataan ruang RTRW Kota Surakarta, Kebijakan Pengembangan Wilayah, dan isu penataan ruang RDTR Kota Surakarta, maka tujuan penataan ruang RDTR Kota Suakarta diarahkan sebagai berikut:

“terwujudnya ruang perkotaan yang bersinergi dengan daerah sekitar yang mengedepankan pelestarian budaya sebagai pendukung pengembangan ruang kota yang berkualitas dan tangguh, yang berbasis industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa”.



Gambar 4. 12. Tujuan Perencanaan Tata Ruang Kota Surakarta
 Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta, 2022

4.9.2 Kebijakan Perencanaan Struktur dan Pola Ruang Kota Surakarta

Kebijakan perencanaan di Kota Surakarta menjadi hal yang krusial dalam menerapkan konsep *15-minutes city*, karena sebuah konsep perencanaan akan lebih mudah diimplementasikan jika didukung oleh dokumen perencanaan yang telah disahkan secara legal. Dalam hal ini dokumen perencanaan yang akan ditinjau adalah Rencana Detail Tata Ruang yang membahas tentang rencana struktur ruang dari jaringan jalan beserta jalur pejalan kaki dan jalur sepeda dan juga rencana pola ruang yang memberikan gambaran tentang rencana penggunaan lahan seperti permukiman dan juga lokasi RTH publik yang dapat menjadi dasar penyediaan ruang terbuka hijau untuk memenuhi indikator pilar lingkungan tujuan Kota yang Berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Melalui kebijakan yang terperinci dan berkelanjutan, kota dapat mengarahkan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas berkelanjutan, termasuk jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda. Selain itu, kebijakan perencanaan yang inklusif juga dapat memastikan bahwa setiap zona permukiman dilengkapi dengan fasilitas publik dan RTH publik yang memadai, menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi penduduk. Dengan demikian, melihat kebijakan perencanaan secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam mengubah visi *15-minutes city* menjadi kenyataan di Kota Surakarta. Perencanaan pola ruang dan struktur ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep *15-minutes city* adalah rencana jaringan transportasi, rencana pengembangan permukiman, rencana pengembangan sarana

pelayanan umum, rencana pengembangan ruang terbuka hijau. Berikut ini merupakan rincian dari kebijakan pengembangan rencana struktur ruang dan pola ruang di Kota Surakarta.

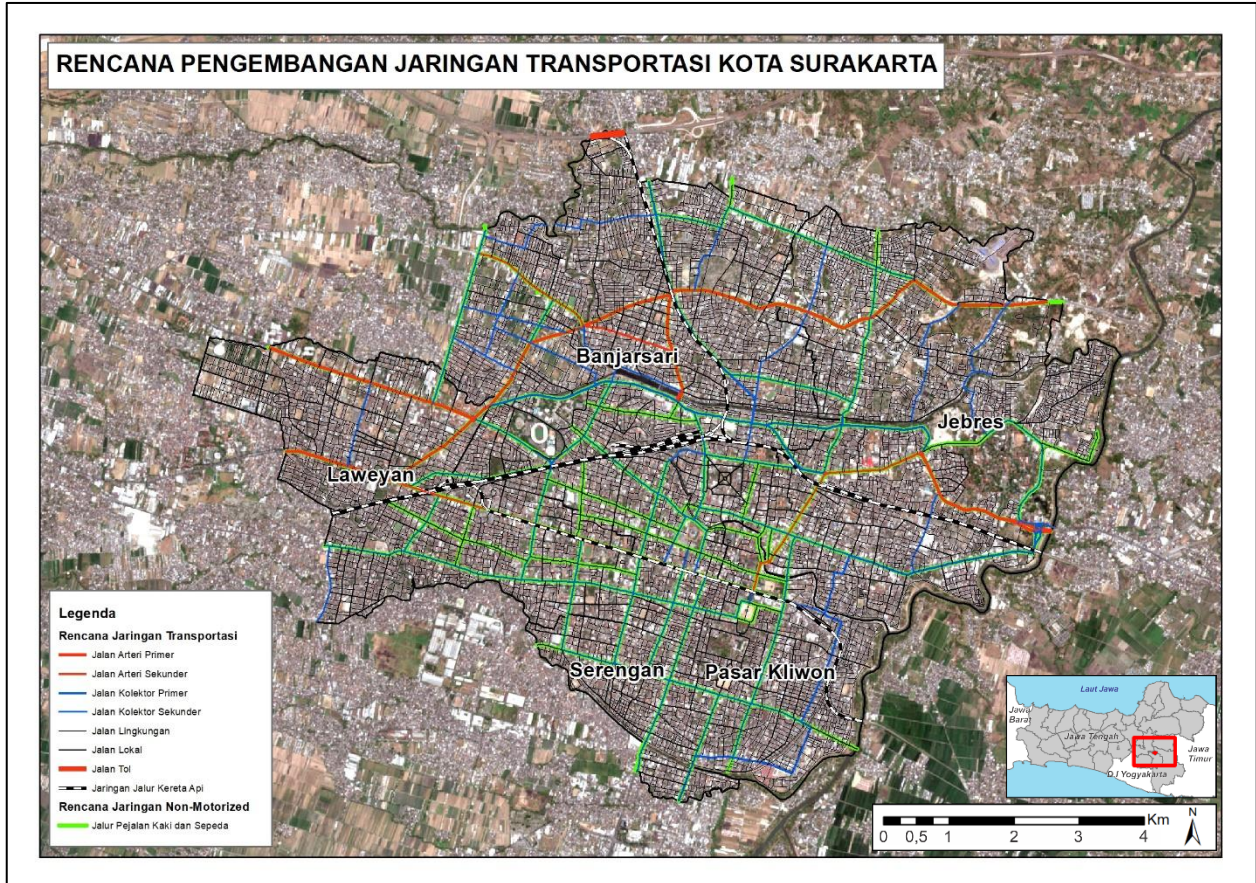
A. Rencana Jaringan Transportasi

Perencanaan jaringan transportasi Kota Surakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Menurut kedua peraturan tersebut, suatu ruas jalan memiliki fungsi tertentu dalam sistem jaringan jalan yang terbagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang saling terkait dalam hierarki yang terintegrasi. Sistem jaringan jalan tersebut didesain untuk mendukung pelayanan jasa distribusi yang seimbang.

Jaringan jalan primer disusun sesuai dengan ketentuan tata ruang dan pengembangan wilayah nasional yang menghubungkan simpul-simpul distribusi utama antar kota. Artinya fungsi utama jalan primer adalah menghubungkan kota-kota secara langsung. Sementara itu, jaringan jalan sekunder dibangun berdasarkan ketentuan tata ruang kota menghubungkan berbagai kawasan dengan fungsi primer, sekunder pertama, sekunder kedua, dan seterusnya hingga ke wilayah perumahan. Jalan-jalan sekunder ini terletak di dalam kota dan tingkatannya ditentukan berdasarkan hierarki kawasan yang dihubungkannya.

Perencanaan sistem transportasi di Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin kelancaran pergerakan penumpang dan barang, baik pergerakan internal kawasan maupun eksternal. Pengembangan sistem transportasi di Kota Surakarta dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting permukiman penduduk dan arus pergerakan lalu lintas. Rencana jaringan transportasi di Kota Surakarta berupa jaringan transportasi darat meliputi:

1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer dan Sekunder
2. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer dan Sekunder
3. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer dan Sekunder
4. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan
5. Rencana Pengembangan Jalur Sepeda di Jalan Arteri dan Kolektor
6. Rencana Pengembangan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal



Gambar 4. 13. Peta Rencana Jaringan Transportasi Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data dari RDTR Kota Surakarta, 2022

B. Rencana Pengembangan Zona Kawasan Permukiman

Zona perumahan merupakan wilayah yang ditetapkan untuk kelompok hunian yang mencakup kehidupan dan aktivitas masyarakat serta dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan. Penetapan zona perumahan bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi pengembangan berbagai jenis hunian yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyediakan beragam tipe hunian guna memperluas akses bagi semua lapisan masyarakat;; dan
3. Merefleksikan pola-pola perkembangan yang diharapkan oleh masyarakat dalam lingkungan hunian saat ini dan masa depan, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Rencana pengembangan zona perumahan di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 2.124,81 hektar terdiri atas:

1. Subzona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1 dengan luas kurang lebih 1.044,81 hektar tersebar di semua kecamatan.

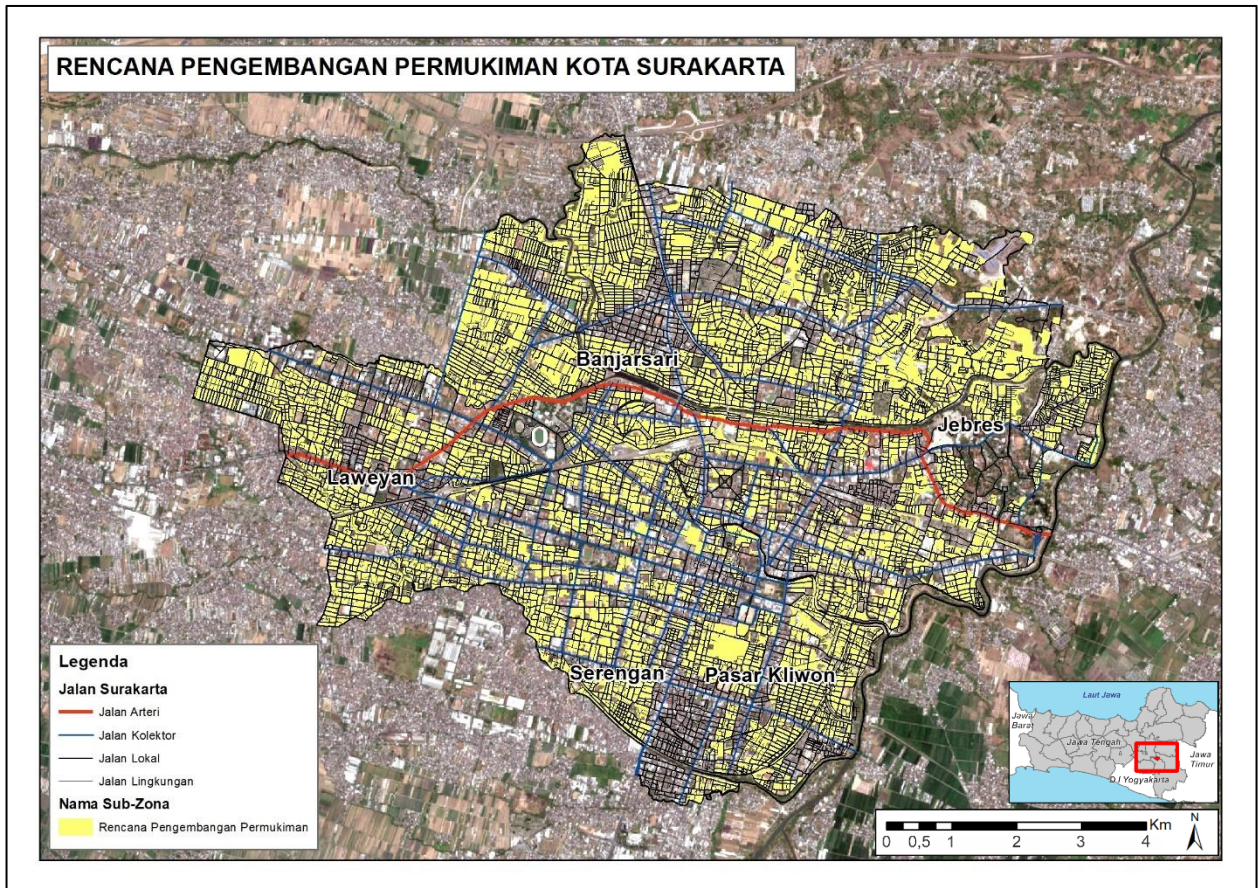
2. Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 dengan luas kurang lebih 11.080 hektar tersebar di semua kecamatan..

Selanjutnya, strategi rencana pengembangan zona perumahan di Kota Surakarta seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 9. Rencana Pengembangan Zona Perumahan RDTR Kota Surakarta

Zona	Sub Zona	Pengembangan	Lokasi
Perumahan	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Pengembangan baru zona perumahan kepadatan sangat tinggi	Semua Kecamatan
		Pengembangan dan Penataan rumah kepadatan sangat tinggi	Semua Kecamatan
		Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum rumah kepadatan sangat tinggi	Semua Kecamatan
		Peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi public di perumahan kepadatan sangat tinggi;	Semua Kecamatan
	Perumahan Kepadatan Tinggi	Pengembangan baru zona perumahan kepadatan tinggi	Semua Kecamatan
		Pengembangan dan Penataan rumah kepadatan tinggi	Semua Kecamatan
		Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum rumah kepadatan tinggi	Semua Kecamatan
		Peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi public di perumahan kepadatan tinggi;	Semua Kecamatan

Sumber : RDTR Kota Surakarta, 2022



Gambar 4. 14. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Surakarta
Sumber : Hasil Olah Data dari RDTR Kota Surakarta, 2023

C. Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona sarana pelayanan umum adalah area yang dirancang untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, kegiatan sosial-budaya, olahraga, dan rekreasi. Fasilitas-fasilitas ini dikembangkan dalam skala yang sesuai dengan tingkat kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan RW. Zona sarana pelayanan umum di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 364,97 hektar terdiri atas:

1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 dengan luas kurang lebih 219,09 hektar meliputi :
 - Fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi
 - Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum dan swasta
 - Fasilitas olahraga dan rekreasi berupa rimba kota dan taman kota
 - Fasilitas peribadatan berupa masjid agung, gereja, pura, dan vihara

2. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 dengan luas kurang lebih 35,42 hektar meliputi:
 - Fasilitas pendidikan berupa SMA dan SMP
 - Fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan apotek
 - Fasilitas olahraga dan rekreasi berupa taman kecamatan
 - Fasilitas peribadatan berupa masjid dan gereja di lingkungan kecamatan
3. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan luas kurang lebih 96,73 hektar meliputi:
 - Fasilitas pendidikan berupa SD dan TK/PAUD
 - Fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu dan klinik/praktek dokter
 - Fasilitas olahraga dan rekreasi berupa taman kelurahan
 - Fasilitas peribadatan berupa masjid di lingkungan kelurahan
4. Subzona SPU Skala RW dengan luas kurang lebih 13,73 hektar meliputi :
 - Fasilitas kesehatan berupa posyandu
 - Fasilitas olahraga dan rekreasi berupa taman RW dan taman RT
 - Fasilitas peribadatan berupa musholla

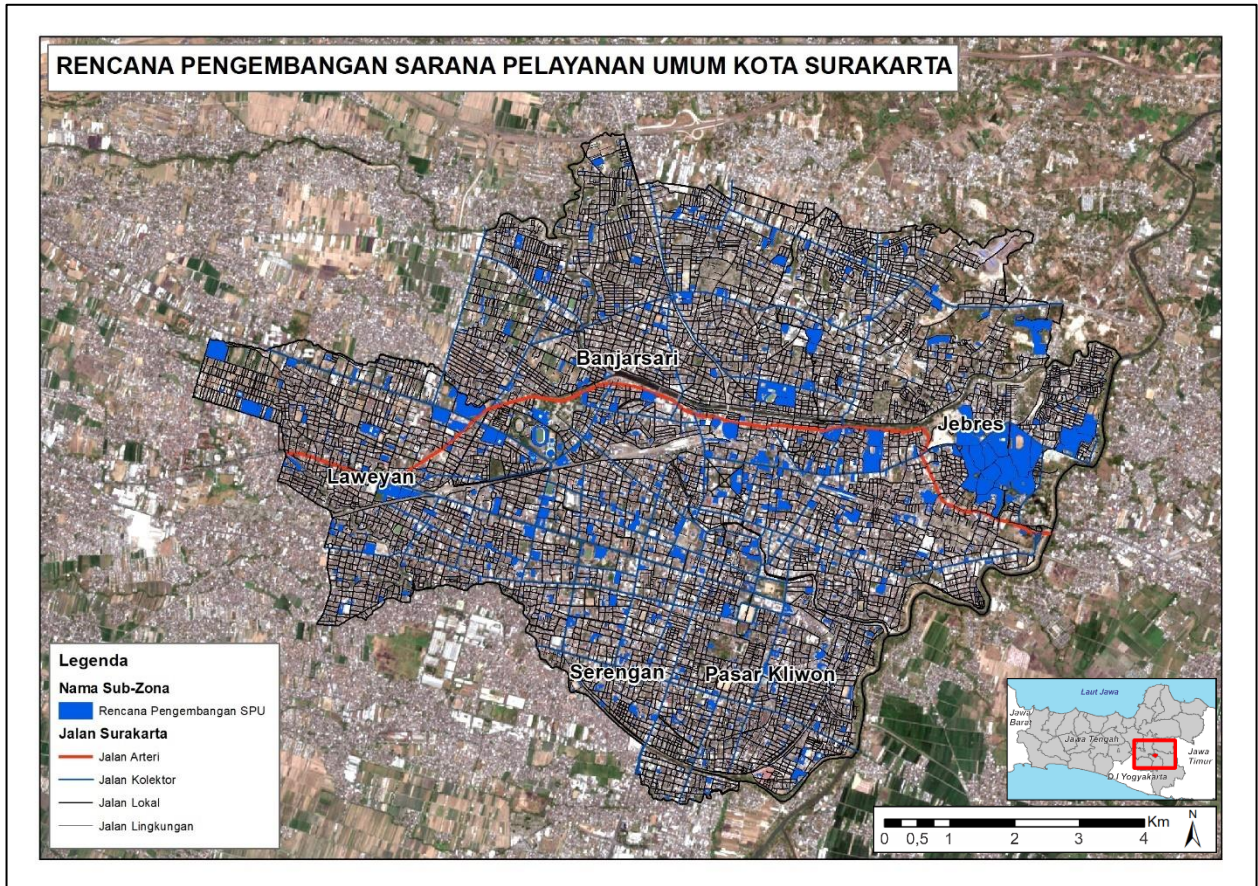
Berikut ini adalah strategi pengembangan zona sarana pelayanan umum di Kota Surakarta:

Tabel 4. 10. Rencana Pengembangan Zona SPU RDTR Kota Surakarta

No	Strategi Pengembangan Zona SPU	Lokasi
1	Penyusunan dan penetapan standart kualitas sarana pelayanan umum skala kota;	Semua Kecamatan
2	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona sarana pelayanan umum skala kota	Semua Kecamatan
3	Pemantauan pembangunan kegiatan sarana pelayanan umum skala kota dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	Semua Kecamatan
4	Penyusunan dan penetapan standart kualitas sarana pelayanan umum skala kecamatan	Semua Kecamatan
5	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona sarana pelayanan umum skala kecamatan	Semua Kecamatan
6	Pemantauan pembangunan kegiatan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	Semua Kecamatan
7	Penyusunan dan penetapan standart kualitas sarana pelayanan umum skala kelurahan	Semua Kecamatan
8	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona sarana pelayanan umum skala kelurahan	Semua Kecamatan
9	Pemantauan pembangunan kegiatan sarana pelayanan umum skala	Semua Kecamatan

	kelurahan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	
10	Penyusunan dan penetapan standart kualitas sarana pelayanan umum skala RW	Semua Kecamatan
11	Peningkatan dan pembangunan RTH di zona sarana pelayanan umum skala RW	Semua Kecamatan
12	Pemantauan pembangunan kegiatan sarana pelayanan umum skala RW dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah dampak sosial	Semua Kecamatan

Sumber : RDTR Kota Surakarta, 2022



Gambar 4. 15. Peta Rencana Pengembangan Kawasan SPU Kota Surakarta
 Sumber : Hasil Olah Data dari RDTR Kota Surakarta, 2022

D. Rencana Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah wilayah yang berbentuk jalur atau kelompok area, yang digunakan secara terbuka dan diperuntukkan untuk pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Zona RTH di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 309,72 hektar, meliputi:

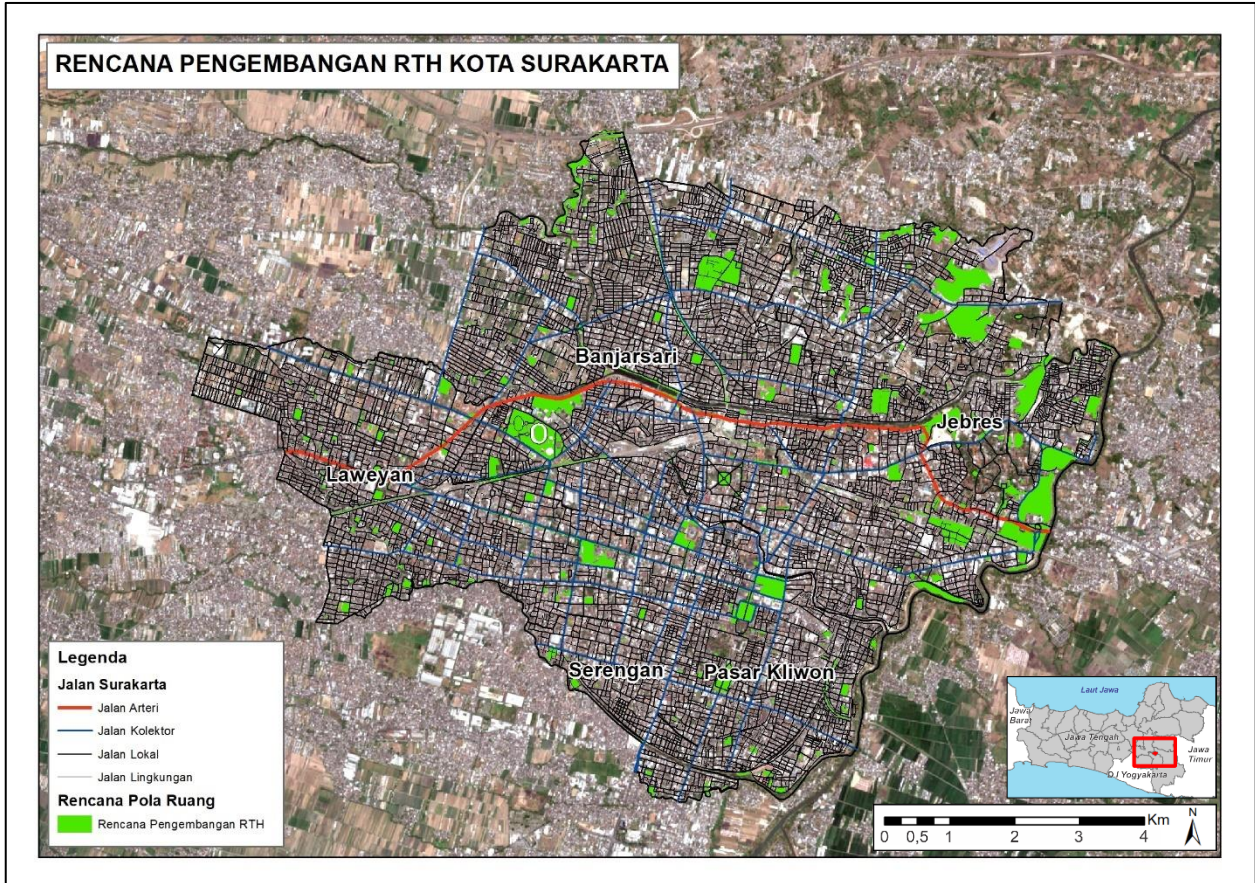
1. Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 dengan luas kurang lebih 22,01 hektar terdapat di Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari.
2. Subzona taman kota dengan kode RTH-2 dengan luas kurang lebih 93,13 hektar tersebar di semua kecamatan.
3. Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 dengan luas kurang lebih 18,60 hektar tersebar di semua kecamatan.
4. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 dengan luas kurang lebih 87,91 hektar tersebar di semua kecamatan.
5. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 dengan luas kurang lebih 74,23 hektar tersebar di semua kecamatan.
6. Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 dengan luas kurang lebih 23,56 hektar tersebar di semua kecamatan.

Rencana pengembangan RTH di Kota Surakarta seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 11. Rencana Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau RDTR Kota Surakarta

Zona	Sub Zona	Pengembangan	Lokasi
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rimba Kota	Pengembangan, penataan dan peningkatan taman kota	Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari
	Taman Kota	Pengembangan, penataan dan peningkatan taman kota	Semua Kecamatan
	Taman Kecamatan	Pengembangan, penataan, dan peningkatan taman kecamatan	Semua Kecamatan
	Taman Kelurahan	Pengembangan, penataan, dan peningkatan taman kelurahan	Semua Kecamatan
	Pemukaman	Pengembangan, penataan, dan peningkatan pemakaman	Semua Kecamatan
	Jalur Hijau	Pengembangan, penataan dan peningkatan jalur hijau	Semua Kecamatan

Sumber : RDTR Kota Surakarta, 2022



Gambar 4. 16. Peta Rencana Pengembangan RTH Kota Surakarta

Sumber : Hasil Olah Data dari RDTR Kota Surakarta, 2022

4.10 Indikator SDGs 11 Kota yang Berkelanjutan di Kota Surakarta

Ketercapaian Tujuan SDGs 11 Kota yang Berkelanjutan di Kota Surakarta dilihat dari target dan indikator yang mendasari tujuan tersebut. Sesuai dengan buku Metadata Indikator SDGs terdapat 8 target yang mendasari tujuan 11 Kota yang Berkelanjutan. Dengan memeriksa pencapaian masing-masing target, pemerintah daerah dapat mengevaluasi progres untuk menilai sejauh mana Kota Surakarta telah berhasil dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada kali ini akan dijabarkan progress ketercapaian dari 8 target dalam tujuan SDGs 11 Kota yang Berkelanjutan di Kota Surakarta yang diambil dari dokumen KLHS RPJPD Kota Surakarta.

Tabel 4. 12. Ketercapaian Indikator SDGs 11 Kota yang Berkelanjutan di Kota Surakarta

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	KETERCAPAIAN
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.			
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	85,30%
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	73,54%
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Seding dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	N/A
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.			
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Perhubungan	75,45%
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	Perhubungan	100%
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.			
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	N/A
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	N/A

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	KETERCAPAIAN
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	100%
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	100%
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.			
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	100%
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	100%
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	75%
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	65,7%
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	100%
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	77%

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	KETERCAPAIAN
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Lingkungan Hidup	85,60%
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Lingkungan Hidup	60,50%
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.			
11.7.1.	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Proporsi 20% total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	62,50%
11.7.2.	Ruang terbuka perkotaan yang terjangkau untuk semua.	Luasan RTH, RTNH yang terkoneksi dengan jaringan jalan.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	75,00%
11.8	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.			
11.8.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Adanya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	100%

Berdasarkan **Tabel 4.12.** didapatkan 8 target dalam tujuan SDGs 11 Kota yang Berkelanjutan di Kota Surakarta ada beberapa target yang ketercapaiannya sudah hampir mendekati 80-100% namun ada juga beberapa target yang belum mencapai target 100% untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Dari target 11.1. akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh, target 11.2 sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, dan target 11.6. mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota masih ada 1 indikator yang persentase ketercapaian kurang dari 80%. Namun pada target 11.7. menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas semua indikator nya yaitu Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas dan Ruang terbuka perkotaan yang terjangkau untuk semua target ketercapaiannya masi kurang dari 80%. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terkait strategi penyediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas agar dapat tercapai di tahun 2030 nantinya.